

Profesionalisme Jabatan Fungsional Pustakawan

Endang Fatmawati¹

Pendahuluan

Perpustakaan dari zaman dahulu sampai sekarang merupakan 'nyawa' sebuah peradaban yang berperan sebagai sumber belajar seumur hidup, karena tidak akan ada peradaban yang dapat berkembang terus membaik tanpa bermodalkan buku. Bahkan di perguruan tinggi perpustakaan dapat dikatakan sebagai jantungnya perguruan tinggi, karena tidak mungkin ada perguruan tinggi yang berhasil melahirkan para lulusan diploma, sarjana maupun pascasarjana dengan prestasi yang tinggi tanpa buku.

Sungguh luar biasa tantangan yang dihadapi oleh para pustakawan saat ini. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga penyedia informasi tidak akan dapat berperan sebagaimana mestinya apabila tidak didukung oleh pustakawan yang mampu mengolah informasi yang dapat diakses secara cepat dan memuaskan pengguna, sehingga perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan mampu mengelola informasi yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya dengan media yang semakin bervariasi. Di era globalisasi saat ini dimana informasi membludak, profesi pustakawan terus menjadi sorotan. Memang diharapkan profesi pustakawan mampu mengelola banjir informasi yang berdampak luas pada masyarakat. Mengutip filsafat lama Jepang **Kaizen**, "Perbaikan secara terus-menerus adalah kunci keberhasilan sebuah pemasaran", yang bisa dianalogikan sebagai usaha berkesinambungan pustakawan dalam mencapai standar layanan prima (*Service Excellence*) yang meliputi: kenyamanan, kebenaran, kecepatan dan keramahan harus dilakukan secara terus-menerus.

Organisasi profesi pustakawan Indonesia hendaknya berupaya melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan layanan terbaiknya bagi kepentingan masyarakat secara terencana dan berkesinambungan.

¹ Endang Fatmawati, S.Sos., M.Si. Kepala Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Profesionalisme Pustakawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **profesional** adalah bersangkutan dengan profesi, yaitu memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, atau mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Sedangkan **profesi** adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, kejuruan, dsb). Profesionalisme pustakawan dapat ditandai dengan pemahaman atas ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi, maupun perasaan bangga dan senang secara lahir batin sebagai seorang pustakawan. Profesionalisme pustakawan hendaknya dibarengi dengan sikap profesional dalam segala bentuk terutama mengenai pekerjaan yang digelutinya. Pada dasarnya pustakawan itu kaya batin, karena dapat membantu orang lain yang membutuhkan informasi tertentu.

Dalam **Kode Etik Pustakawan Indonesia** pada **Bab III pasal 3** mengenai '**Sikap Dasar Pustakawan**', ada beberapa pegangan tingkah laku yang harus dipedomani oleh pustakawan Indonesia, antara lain:

1. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya,
2. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan,
3. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi,
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional,
5. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas dasar profesi,
6. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Selain itu terdapat langkah agar para pustakawan dapat menjadi tenaga profesional, antara lain:

Pertama, pustakawan disamping mempunyai *hard skill* (kemampuan sesuai bidang keilmuan) juga harus ditambah dengan *soft skill* (kemampuan lainnya yang mendukung). Bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada pengguna, bisa menggunakan metode *Person to Person Approach*, karena bagaimanapun pustakawan sebagai penjual jasa dan penyedia informasi harus mengenal koleksi dan berbagai produk jasa yang dihasilkan. Pustakawan harus

proaktif mengikuti perkembangan informasi dari berbagai sumber, baik berita terkini (*trend*) di media massa, artikel maupun perkembangan teknologi informasi lainnya.

Kedua, diantara pustakawan perlu adanya dorongan untuk berprestasi dan siap kompetisi secara sehat, terbuka dan obyektif dengan diri sendiri, rekan seprofesi, atau dengan profesi yang lainnya, serta menguasai ketrampilan di bidangnya dengan kepercayaan diri yang tinggi ditambah dengan kemampuan manajerial yang memadai. Dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan sumber daya manusia di perpustakaan, maka salah satu program yang sudah seharusnya dilakukan oleh perpustakaan adalah mengadakan studi banding / kunjungan ke perpustakaan lain yang lebih bagus, baik dari segi manajemen pengelolaannya maupun teknologi automasinya. Munculnya teknologi informasi yang terus berkembang telah menguntungkan perpustakaan. Tidak saja hal itu telah memberikan kemudahan akses, akan tetapi juga telah membuka peluang-peluang, serta model-model pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi tersebut.

Ketiga, pustakawan harus mempunyai nilai tambah (*personal added value*) di bidang lain, misalnya ahli service komputer, membuat desain web, mahir dalam berbahasa Inggris secara tertulis maupun lisan, mempunyai jiwa *enterpreneurship* (misalnya: melakukan jasa kemas ulang informasi) dan lain sebagainya. Sehingga pustakawan tidak hanya ahli dalam mengadakan bahan pustaka, mengkatalog, mengklasifikasi, mengindeks, mengentri data maupun pekerjaan rutin di perpustakaan yang sifatnya monoton tetapi juga mempunyai keahlian di bidang lain. Dengan salah satu nilai tambah yang berkembang dari pengalaman, pelatihan, mengikuti seminar, lokakarya, *workshop* dan sebagainya, pustakawan akan lebih professional dan mempunyai nilai plus selangkah lebih maju.

Keempat, pustakawan harus mempunyai "Sense-Making" di dalam melayani pengguna perpustakaan. Metode "Sense-Making", dapat membuat sesuatu menjadi bermakna untuk memenuhi kesenjangan antara kebutuhan yang dimiliki pengguna dan yang akan dibutuhkan. Misalnya: pustakawan sudah seharusnya mempelajari 'perilaku' pengguna, yaitu bagaimana mengenai pola pencarian informasi yang dilakukan pengguna perpustakaan tersebut dengan suatu bentuk kajian pemakai.

Sebenarnya pustakawan memiliki peluang yang besar untuk menulis dengan membuat tulisan / artikel baik mengenai bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) maupun bidang lainnya yang lebih umum, karena mereka memiliki akses terhadap sumber informasi yang luas dan beragam. Namun fenomena yang ada di sekitar kita menunjukkan bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh pustakawan tergolong sangat terbatas dan langka. Hal ini dimungkinkan karena keikutsertaan mereka dalam pelatihan teknik penulisan ilmiah yang kurang dan sebagian besar pustakawan memiliki pendidikan SMU maupun Diploma III dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan sarjana atau master / magister. Namun tidak menjamin juga pustakawan yang berpendidikan tinggi juga produktif dengan karya tulis ilmiahnya.

Pustakawan merupakan sebuah profesi dan merupakan jabatan fungsional, sehingga semua kegiatan kepustakawanan dinilai dengan angka kredit dan kenaikan pangkat merupakan suatu tujuan dan prestasi dalam jabatan fungsional pustakawan. Hal ini seiring dengan teori motivasi yang dikemukakan **Mc Celland** dalam **Siagian (2003)** yang mengemukakan bahwa kebutuhan yang pertama dari teori tersebut adalah *need for achievement* (*nAch*) atau kebutuhan akan prestasi. Perolehan angka kredit akan mempengaruhi prestasi, kenaikan jenjang jabatan dan sekaligus pendapatan yang tercermin dalam penggajian golongan dan tunjangan jabatan.

Jabatan Fungsional Pustakawan

Jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu. Berdasarkan **Keputusan Menpan No. 132/KEP/M.PAN/12/2002** mengenai jenjang jabatan fungsional pustakawan terdiri dari 2 (dua) jalur yang perbedaannya didasarkan atas latar belakang pendidikan pustakawan, yaitu : jalur terampil dan jalur ahli. Selanjutnya mengenai besarnya tunjangan jabatan fungsional pustakawan dapat dilihat pada **Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2007** tanggal 28 Juni 2007.

1. Tingkat Terampil, yang berlatar belakang pendidikan D2/D3 Pusdokinfo atau D2/D3 Nonpusdokinfo ditambah diklat yang disetarakan. Jalur terampil meliputi:

- Pustakawan Pelaksana: Golongan ruang II/b, II/c dan II/d, besarnya tunjangan Rp. 240.000,-
 - Pustakawan Pelaksanaan Lanjutan: Golongan ruang III/a dan III/b, besarnya tunjangan Rp. 265.000,-
 - Pustakawan Penyelia: Golongan ruang III/c dan III/d, besarnya tunjangan Rp. 350.000,-.
2. Tingkat Ahli, yang memiliki latar belakang minimal S1 Pusdokinfo atau S1 Nonpusdokinfo ditambah dengan diklat bagi pustakawan tingkat ahli. Jalur ahli meliputi:
- Pustakawan Pertama : Golongan ruang III/a dan III/b, besarnya tunjangan Rp. 275.000,-
 - Pustakawan Muda : Golongan ruang III/c dan III/d, besarnya tunjangan Rp. 375.000,-
 - Pustakawan Madya : Golongan ruang IV/a, IV/b dan IV/c, besarnya tunjangan Rp. 500.000,-
 - Pustakawan Utama : Golongan ruang IV/d dan IV/e, besarnya tunjangan Rp. 700.000,-.

Selanjutnya bagi pejabat fungsional pustakawan yang awal pengangkatannya melalui jalur terampil dan mempunyai ijazah S1 di bidang lain / Nonpusdokinfo, maka bisa beralih ke tingkat Ahli dengan mengikuti Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur). Sedangkan PNS yang berijazah Sarjana (S1) Nonpusdokinfo apabila berkeinginan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional pustakawan, harus mengikuti Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli.

Tujuan utama adanya jabatan fungsional adalah agar pegawai negeri sipil dapat menyelesaikan tugas penuh tanggung jawab profesional, dengan memilih atau menentukan sendiri metode kerja yang sesuai agar dicapai hasil optimal. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan acuan peraturan yang berlaku. Jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan karir dan jabatan pilihan yang perlu dikembangkan sesuai tuntutan jaman dan perkembangan IPTEK.

Pendidikan formal perpustakaan sendiri meliputi tingkat diploma, sarjana dan pascasarjana. Sementara, untuk pendidikan non formal perpustakaan terdiri dari diklat fungsional pustakawan dan teknis kepustakawanan. Dalam petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dikatakan bahwa Pustakawan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Sehingga pustakawan merupakan seseorang yang bekerja secara profesional, bukan pejabat tertentu, bukan dosen, bukan guru yang dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Pustakawan yang profesional pasti akan melakukan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengalaman dalam profesinya.

Kegiatan pustakawan dapat digolongkan ke dalam kegiatan yang bersifat teknis dan analisis. Kegiatan yang bersifat teknis umumnya dilaksanakan dengan ketrampilan yang meliputi pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka / sumber informasi, serta pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi dalam bentuk karya cetak, karya rekam ataupun multimedia. Kegiatan yang bersifat analisis lebih banyak terkait dengan kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengkajian, dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Sebagai suatu profesi pejabat fungsional pustakawan, dituntut untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan yang meliputi dua (2) unsur bidang kegiatan pustakawan, yaitu:

1. Unsur utama, yang terdiri dari:
 - pendidikan,
 - pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi,
 - pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi,
 - pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi,
 - pengembangan profesi.
2. Unsur penunjang, terdiri dari:
 - mengajar,
 - melatih,
 - membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustadokinfo,
 - memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustadokinfo,
 - mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepastakawanan,
 - menjadi anggota organisasi profesi kepastakawanan,
 - melakukan lomba kepastakawanan,

- mendapat penghargaan / tanda jasa,
- memperoleh gelar kesajaranaan lainnya,
- menjadi anggota redaksi penerbitan ilmiah di bidang perpustakaan,
- menjadi anggota tim penilai jabatan pustakawan.

Namun nampaknya, bahwa dari sekian kegiatan unsur utama dan unsur penunjang tersebut di atas, pada umumnya pustakawan masih banyak bertumpu pada kegiatan teknis perpustakaan yang meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka / sumber informasi, dan hanya sedikit sekali tentang pemasyarakatan perpustadokinfo serta pengembangan profesi.

Masalah jabatan fungsional pustakawan di kalangan PNS masih merupakan salah satu isu yang cukup menarik, karena saat ini jabatan fungsional pustakawan rupanya banyak mulai dilirik para PNS. Keuntungannya menjadi pustakawan, antara lain :

- a. batas usia pensiun (BUP) lebih lama,
- b. tidak ada ujian dinas, jika mau pindah dari golongan II ke golongan III,
- c. setiap 2 tahun bisa naik pangkat, jika angka kredit memenuhi,
- d. golongan bisa sampai IVE, jika mulai pengangkatannya dari pustakawan tingkat ahli.

Dalam **Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2003** terdapat ketentuan mengenai perpanjangan batas usia pensiun (BUP) PNS yang secara penuh menduduki jabatan fungsional pustakawan, yaitu 65 tahun bagi pustakawan utama dan 60 tahun bagi pustakawan madya, pustakawan muda dan pustakawan penyelia. Banyak alasan mengapa mereka berminat menjadi pejabat fungsional pustakawan, namun terkadang mereka tidak mau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Contoh : banyak yang berminat menjadi pejabat fungsional hanya untuk memperpanjang BUP (batas usia pensiun) saja. Setelah menjabat struktural, mereka beralih menjadi pejabat fungsional supaya BUPnya bisa mencapai 60 tahun atau bahkan 65 tahun. Padahal dari segi usia, pendidikan dan sebagainya mereka tidak memenuhi syarat. Bisa dibayangkan kualitas mereka setelah menjadi pejabat fungsional dengan jabatan yang cukup tinggi menjadi seperti apa ?. Lalu di benak kita pasti timbul pertanyaan siapa yang salah, yang mengangkat atau yang diangkat ?. Jawabannya tergantung pada moral diri kita masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Majalah "BERITA" IPI Vol.11(1) November 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Jakarta: Balai Pustaka

Perpustakaan Nasional RI, 2003, **Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya**, Jakarta : Perpustakaan Nasional.

Siagian, Sondang, 2003, **Manajemen Sumber Daya**